

**FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA  
DALAM PENYALURAN PROGRAM BANTUAN  
PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA TINOKKAH**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**DWI ANANDA MELANI**  
**NPM : 1903100029**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**  
**Konsentrasi Pembangunan**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**  
**MEDAN**  
**2023**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : **DWI ANANDA MELANI**

NPM : 1903100029

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

PENGUJI II : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si**

PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.IKom



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

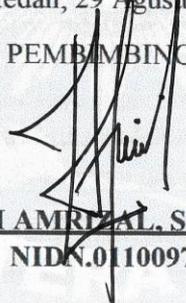
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **DWI ANANDA MELANI**  
NPM : 1903100029  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinokkah

Medan, 29 Agustus 2023

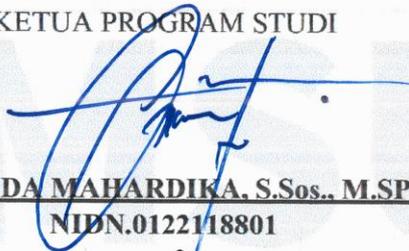
PEMBIMBING



**DEDI AMRIYAL, S.Sos., M.Si**  
NIDN.0110097201

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**  
NIDN.0122118801

DEKAN



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**  
NIDN.0030017402

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini, saya DWI ANANDA MELANI, NPM 1903100029, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, *plagiat* atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya *plagiat*, atau karya jiplakan dari karya orang lain;
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan;
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 08 Agustus 2023  
Yang Menyatakan,



*Melani*  
DWI ANANDA MELANI  
1903100029

## **Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinokkah**

**Dwi Ananda Melani  
NPM 1903100029**

### **ABSTRAK**

Dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai, pemerintah meminta proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah hingga level terbawah yaitu kepala desa di wilayah masing-masing agar mengkoordinir bantuan sosial harus secara tepat sasaran. Desa Tinokkah Kabupaten Serdang Bedagai, kepala desa berkoordinasi dengan seluruh kepala dusun di Desa Tinokkah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan tugasnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi koordinasi vertikal kepala desa dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai di Desa Tinokkah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dengan metode pengolahan data adalah kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu data primer yang diperoleh dengan cara wawancara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi vertikal kepala desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tujuan dari program BPNT di Desa Tinokkah Kabupaten Serdang Bedagai sudah tepat sasaran dalam memberikan kendali kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, kepala desa dan perangkat desa sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam melaksanakan penyaluran program BPNT, kepala desa selalu memberikan pengarahan kepada perangkat desa untuk membahas penyaluran program bpnt, dan kerjasama antara kepala desa dan perangkat desa sudah berjalan dengan baik dan tidak memiliki kendala.

**Kata kunci: fungsi, koordinasi, koordinasi vertikal, penyaluran, program**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuan membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Serangkai kata terimakasih juga saya berikan khusus kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan yang saya sayangi yaitu Ayahanda Lasimin dan Ibunda Ertik Hariyani yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata I sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lembaran ini sekaligus menjadi media bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah cukup banyak memberikan semangat. Penulis menyadari

bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dari berbagai pihak dan Kasih sayang yang di berikan oleh Allah SWT sehingga semua kendala yang dihadapi dapat diatasi. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mempermudah dan memberikan informasi-informasi terkait perkuliahan.
9. Bapak Kepala Desa Tinokkah Rio Pances Damanik, S.H yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian di Desa Tinokkah.
10. Kepada kakak penulis Nirwanda Desnila Putri, S.Kom yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti.
11. Teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi yaitu Winda Fitria Ismail, S.Pd, Afifa Aurora Saharani, Putri Alfiyani, yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi baik suka maupun duka.
12. Kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai wadah penulis dalam menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman.
13. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terkhusus Amelia Lestari, Qurreita Ayuni, Cindy Aulia, Erma Vania dan Fetry Hijrianisya yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua

kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya.

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 25 Juli 2023



Penulis

**Dwi Ananda Melani**

**1903100029**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	7
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
1.5.Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
2.1.Koordinasi.....	10
2.1.1.Pengertian Koordinasi .....	10
2.1.2.Jenis-Jenis Koordinasi.....	11
2.1.3.Tujuan Koordinasi.....	13
2.1.4.Mekanisme dan Proses Koordinasi.....	14
2.1.5.Koordinasi Vertikal.....	15
2.1.6.Hambatan Dalam Pengkoordinasian.....	16
2.2.Program Kerja.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>19</b>
3.1.Jenis Penelitian.....	19
3.2.Kerangka Konsep.....	19
3.3.Defenisi Konsep.....	20
3.4.Kategorisasi Penelitian.....	21

3.5. Informan.....	21
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7. Teknik Analisis Data.....	23
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	24
3.9.1. Desa Tinokkah.....	24
3.9.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Kepala Dusun.....	25
3.9.2.1. Kepala Desa.....	25
3.9.2.2. Kepala Dusun.....	26
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	28
4.1.1. Adanya Hubungan Efektif.....	28
4.1.2. Adanya Hubungan Hierarkis.....	29
4.1.3. Adanya Pengarahan.....	29
4.1.4. Adanya Kerjasama.....	30
4.2. Pembahasan.....	30
4.2.1. Adanya Tujuan yang Ingin Dicapai Dalam Program BPNT.....	30
4.2.2. Adanya Pelaksanaan Tugas Sesuai Tupoksi.....	32
4.2.3. Adanya Pengarahan Langsung Dari Atasan ke Bawahan.....	33
4.2.4. Adanya Kerjasama.....	34
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
5.1. Simpulan.....	36
5.2. Saran.....	36

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Peta Desa Tinokkah

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pemerintah desa Tinokkah

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : Surat Pernyataan
- Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran V : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran VI : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran VII : Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran VIII : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran IX : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran X : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran XI : Pedoman Wawancara
- Lampiran XII : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran XIII : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran XIV : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran XV : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XVI : Surat LoA JAPK
- Lampiran XVII: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah program penanganan fakir miskin dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin yang secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ *e-warong* yang bekerjasama dengan Bank.

Menurut Waryadi & Hanriana (2022), program bantuan pangan non tunai merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran bantuan pangan secara non tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas yang memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran bantuan pangan non tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran bantuan pangan non tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan bantuan pangan non tunai pada tahun 2023 yang dimulai bulan Januari 2023 menyiapkan dana Rp 470 triliun untuk bantuan sosial pada 2023 mendatang. Dimana target penerimanya sejumlah 18,8 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dan nominal bantuannya sebesar Rp 200.000 secara non tunai setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu, pemerintah meminta proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah hingga level terbawah yaitu kepala desa di wilayah masing-masing agar mengkoordinir bantuan sosial harus secara tepat sasaran. Dengan mempercayakan langsung

kepala desa, sekretaris desa dan berkoordinasi dengan aparat-aparat desa tentu tidak akan terjadi tumpang tindih, karena mereka sendirilah yang lebih paham dan mengenal warga-warganya, sehingga dana bantuan sosial dari pemerintah pusat tepat sasaran.

Dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah memiliki dasar hukum kepada kepala desa dan aparat-aparat desa agar dapat menjalankan program tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala desa dan aparat-aparat desa berkoordinasi untuk pengumpulan data KPM, yang dimana data tersebut akan diberikan kepada Bupati. Dari data tersebut akan terbagi menjadi penerima BPNT atau penerima bantuan sosial lainnya. Hal ini terdapat di Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Bagian 2 pasal 4-5, yang dimana proses usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa, usulan kementerian sosial, dan pendaftaran mandiri melalaui aplikasi. Lalu, proses usulan data dari musyawarah desa diberikan kepada kepala dusun, kepala desa, dan pendaftaran mandiri. Dan data tersebut akan diserahkan ke dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Hasil dari verifikasi dan validasi data dapat dilihat di aplikasi dinas sosial daerah kabupaten daerah/kota.

Desa Tinokkah merupakan salah satu desa di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Aspek geografis Desa Tinokkah mempunyai luas wilayah  $\pm 145,26 \text{ km}^2$  yang terbagi dalam 7 dusun

dan jumlah penduduk 32.225 jiwa. Kalau dilihat dari kepadatan penduduk, Desa Tinokkah terkategori desa dengan penduduk terbilang banyak. Desa Tinokkah merupakan desa yang wilayahnya berada di perkampungan dan wilayah perkebunan swasta PMA yaitu PT. Bridgestone Kebun Nagaraja. Disekita desa ini, banyak terdapat tanaman sawit dan karet. Di desa Tinokkah juga banyak ditemukan gudang sawit. Tandan Buah Sawit (TBS) dari kebun rakyat pada umumnya dijual di gudang sawit yang ada di Desa Tinokkah. Ada juga yang menjualnya lewat agen atau toke dan langsung di jual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Kota Tebing Tinggi. Jadi, aspek kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Tinokkah sangat tergantung dengan kestabilan harga sawit dan karet. Sehingga kondisi Desa Tinokkah dari aspek fisik dianggap rawan ekonomi, rawan pendidikan, rawan kesehatan, dan rawan pangan. Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Tinokkah masuk kedalam kriteria program bantuan pangan non tunai.

Dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai di Desa Tinokkah, kepala desa berkordinasi dengan seluruh kepala dusun di Desa Tinokkah dalam menjalankan tugasnya dari pendaftaran calon KPM, pengumpulan data calon KPM, sampai penyaluran dana BPNT ke masyarakat yang menerima bantuan sosial tersebut. Agar proses pelaksanaan program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan maka Kepala Desa Tinokkah memiliki fungsi koordinasi vertikal dengan kepala dusun. Koordinasi vertikal merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak

terjadi kekacauan, percekocokan dengan jalan menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung.

Pemerintah Desa Tinokkah memulai program BPNT ini pada tahun 2019. Berdasarkan pada Buku Pedoman Umum BPNT tahun 2018 dan Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa tahun 2020 bahwa pelaksanaan program ditingkat desa, perangkat desa/kelurahan setempat berkoordinasi dengan pendamping program BPNT untuk mengumpulkan dan membantu masyarakat untuk melengkapi data-data masyarakat yang belum lengkap. Pada Buku Pedoman Umum BPNT tahun 2018 dijelaskan mengenai struktur dan keanggotaan tim koordinasi BPNT di kecamatan, yang dimana kepala desa sebagai penanggung jawab, kepala dusun sebagai pemantau dan evaluasi, serta pendamping BPNT dan e-warong sebagai pelaksana kegiatan penyaluran BPNT. Penetapan e-warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yaitu, memiliki kemampuan reputasi, kredibilitas dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur. Memiliki sumber

penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM. Menjual beras dan/telur sesuai harga pasar, dll. Dalam pelaksanaan program ini, perangkat-perangkat desa sangat dibutuhkan peranannya dalam memantau dan mengevaluasi program yang telah dijalankan mengenai sesuai atau tidaknya penerima BPNT yang telah ditetapkan oleh pihak pelaksana desa dan dapat berkoordinasi dengan pendamping BPNT untuk menyediakan tempat, menyusun jadwal pendistribusian kartu kombo beserta aktivasi rekening oleh KPM, M. Berdasarkan informasi yang didapat dilapangan masih belum efektif dalam penyaluran BPNT. Hal ini disebabkan adanya ketidaktepat sasaran yang terletak di data-data KPM dalam penyaluran bantuan pangan tersebut sehingga penyaluran BPNT tidak merata di Desa Tinokkah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana koordinasi kepala desa dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinokkah”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana fungsi koordinasi vertikal Kepala Desa dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Tinokkah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi koordinasi vertikal Kepala Desa dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Tinokkah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat dalam penelitian adalah:

- a. Bagi penulis, memberi kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi koordinasi vertikal kepala desa dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai di Desa Tinokkah.
- b. Bagi Kepala Dinas Sosial Serdang Bedagai, dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun mengenai koordinasi dalam penyaluran program bpnt.

- c. Bagi Kepala Desa, dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah diteliti oleh peneliti di lapangan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB 2 URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan fungsi koordinasi vertikal kepala desa dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT) di desa Tinokkah.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, analisis/informan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujinya.

#### **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang pembahasan dan hasil penelitian fungsi koordinasi vertikal kepala desa dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT) di desa Tinokkah.

## BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Koordinasi**

##### **2.1.1. Pengertian Koordinasi**

Menurut Muchlisin Riadi (2020), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Moekizat (2014), menyatakan bahwa koordinasi merupakan penyalarsan secara teratur/ menyusun kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu Handoko (2016), mendefinisikan Koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi.

Menurut Anggara dan Sumarti (2016), koordinasi adalah proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik antara kegiatan, baik itu kegiatan fisik dan kegiatan rohaniyah. Menurut Hasibuan (2011), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dari beberapa pengertian koordinasi di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah kerjasama antar unit atau bagian yang menciptakan

keharmonisan kerja dalam melakukan proses kegiatan dalam mencapai tujuan bersama.

### **2.1.2. Jenis-Jenis Koordinasi**

Menurut Sentika (2018), koordinasi intern terdiri atas koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal: (a) koordinasi vertikal atau koordinasi structural, dimana antara yang mengkoordinasikan secara sktruktural terdapat hubungan hierarki. Contoh koordinasi yang dilakukan oleh seorang deputi terhadap para asisten deputi, atau kepala direktorat yang berada dalam lingkungan direktoratnya; (b) koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, dimana tempat antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkatnya aselonnya. Menurut tugas dan fungsi keduanya mempunyai suatu ikatan dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi; (c) koordinasi diagonal yakni koordinasi fungsional, mempunyai maksud yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi derajat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, namun satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando.

Menurut Sugandha (2011), beberapa jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurnya: (a) menurut lingkupnya terdapat koordinasi intern, yaitu koordinasi antar pejabat antar unit di dalam suatu organisasi dan koordinasi ekstern, yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi; (b) menurut arahnya, terdapat koordinasi horizontal

yaitu koordinasi antar pejabat atau antar yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang setingkat, selanjutnya koordinasi vertikal yaitu koordinasi antar pejabat dari unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya, koordinasi diagonal yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya dan koordinasi fungsional yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.

Menurut Hasibuan (2017) berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam organisasi. Makna kedua tipe koordinasi dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini: (a) koordinasi vertikal ( vertical coordination ) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung; (b) koordinasi horizontal ( horizontal coordination ) adalah koordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisas (aparat) yang setingkat. Dari beberapa pengertian jenis-jenis koordinasi di atas dapat disimpulkan bahwa

suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit-unit yang sama tugasnya.

### **2.1.3. Tujuan Koordinasi**

Menurut Handoko (2016), berpendapat bahwa manfaat koordinasi antara lain: (a) dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi; (b) menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting; (c) menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi; (d) menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi; (e) menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Sedangkan Hasibuan (2017), berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni: (a) untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan; (b) agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.; (c) agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan; (d) supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi; (e) supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Jadi koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan

perusahaan. Dari beberapa pengertian tujuan koordinasi di atas dapat disimpulkan bahwa apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan.

#### **2.1.4. Mekanisme Dan Proses Koordinasi**

Menurut Sugandha (2011), mekanisme koordinasi yaitu adanya kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi (untuk kerjasama antar instansi, adanya komunikasi yang efektif, tujuan kerjasamanya dan peranan dari tiap pihak yang terlibat, harus dapat menciptakan organisasinya sendiri sedemikian rupa sehingga menjadi suatu organisasi yang mampu memimpin organisasi-organisasi lainnya, meminta ketaatan, kesetiaan, dan disiplin kerja tiap pihak yang terlibat, terciptanya koordinasi di dalam suatu organisasi akan menunjukkan bahwa organisasi tersebut benar-benar bergerak sebagai suatu sistem, dan pemimpin akan bertindak sebagai fasilitator dan tenaga pendorong.

Sedangkan Siagian (2013), berpendapat mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengkoordinasi, yaitu dengan melakukan briefing staf untuk memberitahukan kebijaksanaan pimpinan organisasi kepada staf yang dalam waktu sesingkat mungkin harus diketahui dan mendapat perumusan. Setelah itu diadakan rapat staf untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh staf serta mengadakan integrasi dari pada pokok-pokok hasil pekerjaan staf. Lalu mengumpulkan laporan-laporan

mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi. Selanjutnya mengadakan kunjungan serta inspeksi mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi serta memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan proses koordinasi bertujuan untuk menjaga komunikasi dan hubungan antara pimpinan dengan bawahannya dalam kegiatan koordinasi.

#### **2.1.5. Koordinasi Vertikal**

Menurut Anggara dan Sumarti (2016), koordinasi vertikal yaitu menunjukkan pengembangan hubungan yang efektif dan disatupadukan antar-kegiatan pada tingkat organisasi yang berlainan, contohnya persetujuan mengenai pengeluaran modal pada tingkat wakil direktor dikoordinasikan dengan penyerahan dan penerimaan pelengkapan modal pada tingkat pelaksanaan. Menurut Handayani (2016), koordinasi vertikal yaitu antar pihak yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis karena satu dan lainnya berada pada satu garis komando (*line of command*). Misalnya, koordinasi yang dilakukan oleh kepala direktur yang berada dalam lingkungan direktoratnya.

Menurut Deswimar (2009), koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugas atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada

di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan oleh pemimpin atau kepala desa karena kepala desa bisa memberi sanksi terhadap aparat atau pegawai yang sudah diatur. Menurut Syafi'i (2011), koordinasi vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lain yang derajatnya lebih rendah.

Berdasarkan uraian diatas, koordinasi vertikal adalah koordinasi yang menunjukkan pembangunan hubungan antara unit-unit dalam suatu organisasi dengan begitu akan menimbulkan hasil yang lebih efektif didalam organisasi tersebut.

#### **2.1.6. Hambatan Dalam Pengkoordinasian**

Menurut Handyaningrat (2016), yang menjadi hambatan-hambatan dalam mengkoordinasi adalah sebagai berikut, yaitu hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural). Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan, disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit) kurang jelas. Di samping itu adanya hubungan dan tata kerja yang kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan di antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasi ada hubungan dalam susunan organisasi yang bersifat hierarki. Sedangkan menurut Sugandha (2011), yaitu kesalahan anggapan orang mengenai organisasinya sendiri, kesalahan anggapan orang mengenai instansi induknya, kesalahan pandangan mengenai

arti koordinasi sendiri, dan kesalahan pandangan mengenai kedudukan departemennya di pusat. Berdasarkan uraian diatas, hambatan dalam pengkoordinasian disebabkan oleh sumber daya manusianya yang belum memahami arti koordinasi di organisasinya.

## **2.2. Program Kerja**

Menurut E. Hetzer (1983), program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan, suatu program disusun berdasarkan tujuan ataupun target yang ingin dicapai, sedangkan susunan perencanaan program-program tersebut disebut sebagai program kerja. Adapun kerangka penyusunan program kerja menurut Andilie Under (2013), mencakup beberapa aspek sebagai berikut: (a) perencanaan, seorang pimpinan harus bisa memilih program kerja yang menjadi prioritas utama dalam sebuah organisasi yang menguntungkan, menentukan sebuah kepanitiaan dan menentukan bidang-bidang yang dibutuhkan, menentukan garis-garis besar dan tata cara pelaksanaan program kerja dari tiap-tiap bidang, mengalokasikan sumberdaya dan mengontrol jalannya pelaksanaan: (b) program kerja prioritas; (c) tujuan; (d) isu (analisis system); (e) cakupan: (f) waktu.

Menurut Hasanah (2021), dalam sebuah organisasi pemerintahan seperti kecamatan, program kerja yang dimiliki secara umum merupakan bagian dari

perangkat program pemerintah daerah. Program kerja kecamatan pada umumnya meliputi aspek perencanaan, aspek pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, serta evaluasi dan pelayanan, aspek perencanaan yang dimaksudkan disini adalah perencanaan dalam hal perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan tata ruang, dan sebagainya. Berdasarkan uraian diatas, maka program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

## **BAB III**

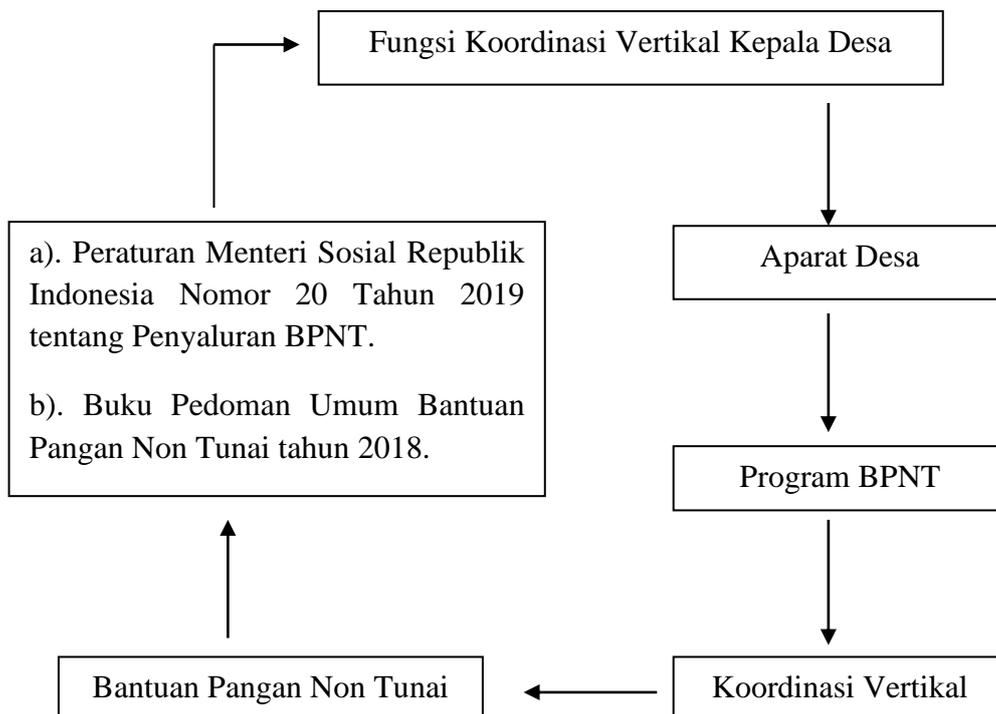
### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dengan metode pengolahan data adalah kualitatif yaitu suatu upaya yang sistematis dalam penelitian sosial. Penelitian kualitatif merupakan alat untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala sosial. Penelitian kualitatif pada umumnya menilai fakta atau gejala sosial yang diteliti tidak menggunakan angka, melainkan cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata.

#### **3.2. Kerangka Konsep**

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinokkah. Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka kerangka konsep yang digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti apa yang digambarkan dalam bagan pada halaman berikut:



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**

### 3.3. Definisi Konsep

Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang diteliti. Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

- a. Koordinasi adalah kerjasama antar unit atau bagian yang menciptakan keharmonisan kerja dalam melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Koordinasi vertikal adalah koordinasi yang menunjukkan pembangunan hubungan antara unit-unit dalam suatu organisasi agar hasil tersebut lebih efektif.

- c. Program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

### **3.4.Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya hubungan yang efektif.
- b. Adanya hubungan hierarkis.
- c. Adanya pengarahan.
- d. Adanya kerjasama.

### **3.5.Informan**

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian menggunakan informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Informan 1

Nama : Rio Pances Damanik, S.H

Usia : 47 tahun

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Tinokkah

- b. Informan 2

Nama : Yusrizal  
Usia : 30 tahun  
Jabatan : Kepala Dusun VI  
Alamat : Nagori II Dusun VI

c. Informan 3

Nama : Oka Darma, S.Pd  
Usia : 35 tahun  
Jabatan : Pendamping BPNT  
Alamat : Siromang Dusun VII

d. Informan 4

Nama : Mardiana Sitepu  
Usia : 51 tahun  
Jabatan : Penerima BPNT  
Alamat : Nagori II Dusun VI

e. Informan 5

Nama : Aben Saragih  
Usia : 67 tahun  
Jabatan : Penerima BPNT  
Alamat : Nagori II Dusun VI

f. Informan 6

Nama : Sujani  
Usia : 66 tahun  
Jabatan : Penerima BPNT

Alamat : Nagori II Dusun VI

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Data Primer

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan cara-cara wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan.

#### b. Data Sekunder

Pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Didalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah kategorisasi, yaitu suatu kegiatan yang berisi pengumpulan data, pengolahan data yang terdiri dari data yang diperoleh disatukan lalu disimpulkan dalam kategori-kategori yang disiapkan. Dari kesimpulan tiap kategori dilakukan pengambilan kesimpulan untuk melihat kesimpulan secara umum yang menjadi kesimpulan skripsi.

### **3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, “Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di

Desa Tinokkah”. Maka penelitian ini dilakukan di Desa Tinokkah Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan perkiraan waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Juni 2023- Juli 2023.

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

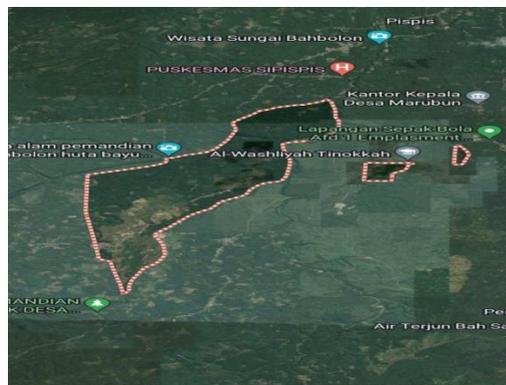
No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian	Lokasi Penelitian
1	Pengajuan judul	06 Februari 2023	Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2	Penyusunan proposal	16 Februari 2023	Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3	Seminar Proposal	17 Maret 2023	Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4	Berkunjung ke Kantor Desa Tinokkah menyerahkan Surat Izin Penelitian Mahasiswa	14 Juni 2023	Kantor Desa Tinokkah
5	Keluarnya Surat Pemberian Izin Penelitian Mahasiswa	28 Juni 2023	Kantor Desa Tinokkah
6	Turun ke Lapangan untuk wawancara ke informan	01 Juli 2023	Desa Tinokkah
7	Analisis dan pengolahan data	03 Juli 2023	Desa Tinokkah
8	Penyusunan Laporan Skripsi	5 Juli 2023	Desa Tinokkah

### 3.9.Deskripsi Lokasi Penelitian

#### 3.9.1 Desa Tinokkah

Tinokkah adalah desa di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Tinokkah merupakan satu dari 20 desa yang ada di Kecamatan Sipispis. Desa Tinokkah ini letaknya tepat diarah utara Kecamatan Sipispis. Secara geografis, desa ini terletak di dataran tinggi, berbatasan langsung

dengan Desa Bahtonang Kabupaten Simalungun. Ditilik dari sisi demografis, penduduk Tinokkah sebagian besar adalah orang Batak Toba dan Jawa. Dominan bermatapencaharian sebagai petani kebun dengan tanaman keras, seperti kelapa sawit dan karet. Demikian juga, terdapat tanaman semusim seperti jagung. Kita juga bisa menemukan persawahan dengan tanaman padi, namun dengan jumlah yang minim.



**Gambar 3.2 Peta Desa Tinokkah**

### **3.9.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Kepala Dusun**

#### **3.9.2.1. Kepala Desa**

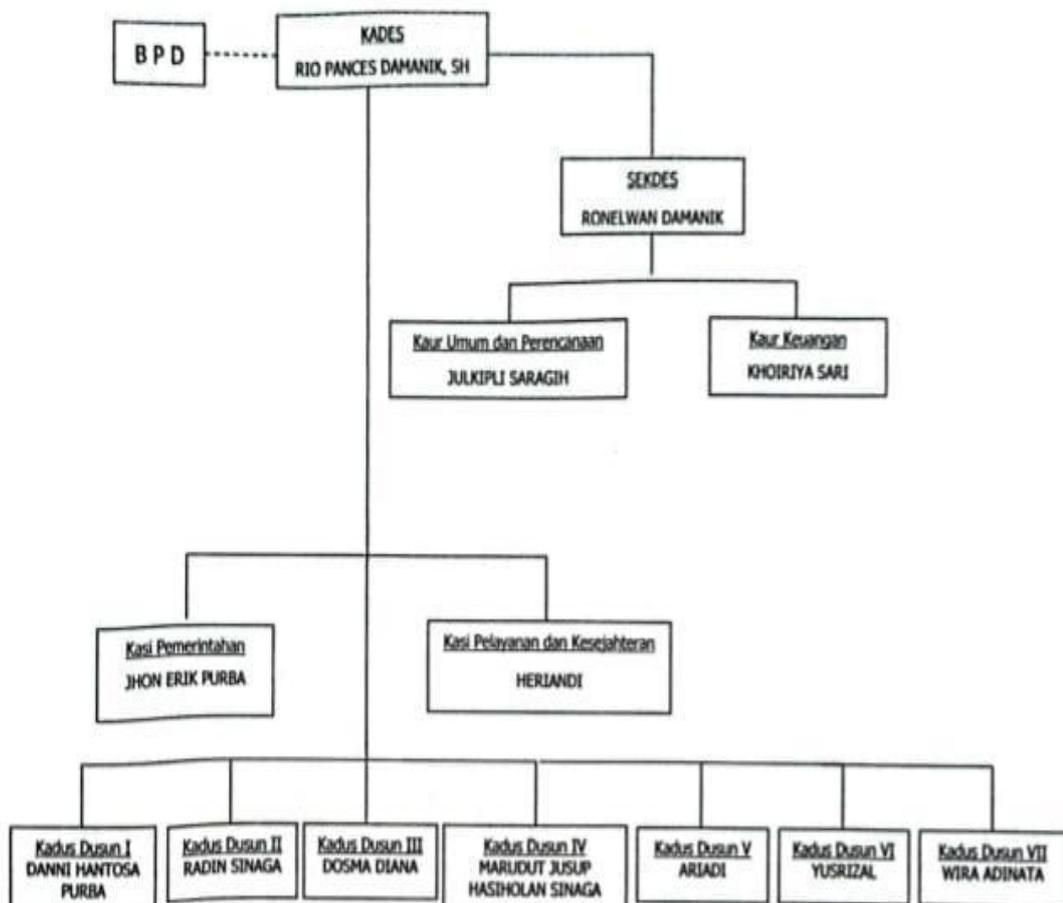
- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat. Seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### **3.9.2.2. Kepala Dusun**

- a. Menyusun perencanaan di bidang kewilayahan.
- b. Melakukan pembinaan dan ketertiban masyarakat.
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- d. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan konflik antar anggota masyarakat.
- e. Melaksanakan tugas kan pendataan sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayahnya.
- f. Menyosialisasikan regulasi yang berkaitan dengan masyarakat.
- g. Menyosialisasikan program-program pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa.
- h. Melaksanakan pengawasan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

- i. Membantu kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya.
- j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala desa.



**Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tinokkah**

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Pada bab ini menyajikan data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang sudah disebutkan di bab sebelumnya. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam dengan beberapa tahapan yang dilakukan diantaranya: penelitian diawali dengan menjawab permasalahan yang akan dijawab, selanjutnya melakukan wawancara dengan enam orang informan yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, pendamping BPNT, dan masyarakat penerima BPNT.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan. Adapun daftar pertanyaan yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

##### **4.1.1. Adanya Hubungan Efektif**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sujani selaku masyarakat penerima BPNT mengatakan bahwa program BPNT berjalan dengan baik dan kebutuhan pangan sudah tersalur dan sesuai dengan yang dibutuhkan penerima BPNT. Sama halnya dengan Bapak Aben Saragih dan Ibu Mardiana Sitepu selaku masyarakat penerima BPNT bahwa penyaluran BPNT tidak memiliki kendala sebab Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan perangkat desa. Tetapi, dari sisi pendamping BPNT Bapak Oka Darma, S.Pd bahwa kendala untuk mencapai pemenuhan kebutuhan pangan penerima BPNT terletak di masyarakat yang belum menerima program BPNT tersebut. Padahal mereka juga sangat membutuhkan bantuan tersebut. Dalam hal ini, Kepala Desa Bapak Rio Pances, S.H akan mengatasi kendala tersebut dengan mengawasi penyaluran program BPNT tersebut agar mengetahui apakah penyaluran BPNT tersebut tepat

sasaran atau tidak. Sehingga, apabila terjadi data yang tumpang tindih, maka kepala desa dan perangkat-perangkat desa harus melakukan proses pendataan ulang agar program BPNT tepat sasaran dan juga efektif.

#### **4.1.2. Adanya Hubungan Hierarkis**

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Sujani, Bapak Aben Saragih, Ibu Mardiana Sitepu, Bapak Rio dan Bapak Yusrizal mengatakan bahwa di desa Tinokkah sudah terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, masyarakat juga berpendapat struktur tersebut sudah bagus. Dan kepala desa beserta dengan perangkat-perangkat desa sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan dengan tupoksinya masing-masing.

#### **4.1.3. Adanya Pengarahan**

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa bentuk pengarahan yang dilakukan kepala desa dalam mengkoordinasikan perangkat desa untuk penyaluran program BPNT sudah bagus. Hal tersebut dapat terlihat di setiap kegiatan penyaluran, tidak ada kendala. Kepala Desa Bapak Rio Pances, S.H dan Kepala Dusun Bapak Yusrizal juga menambahkan pengarahan yang dilakukan kepala desa kepada perangkat-perangkat desa dalam membahas penyaluran BPNT tersebut adalah dengan mengadakan musyawarah desa agar seluruh kepala dusun membantu dan menertibkan masyarakat penerima BPNT agar kegiatan penyaluran BPNT berjalan dengan lancar.

Untuk kendala yang dihadapi kepala desa dan perangkat-perangkat desa dalam memberikan pengarahan dalam penyaluran BPNT, mereka berpendapat bahwa kendala tersebut terletak di masyarakat. Dari masyarakat yang kurang paham dengan apa yang disampaikan kepala desa dan perangkat-perangkat desa mengenai BPNT, sulitnya mengumpulkan masyarakat dikarenakan memiliki kesibukan masing-masing, sehingga pengarahan tersebut sering tertunda, aspirasi-aspirasi masyarakat yang pro dan kontra sehingga terjadinya keributan antar

masyarakat. Hal ini disebabkan karena ada beberapa masyarakat yang tidak mau mengalah dengan masyarakat yang lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut.

#### **4.1.4. Adanya Kerjasama**

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat penerima BPNT berpendapat bahwa kerjasama yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa berjalan dengan baik. Menurut Kepala Desa Bapak Rio Pances, S. H bentuk kerjasama yang dilakukan beliau dengan perangkat desa adalah dengan berkoordinasi dengan perangkat desa sehingga kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Untuk kendala yang dihadapi dalam melakukan kerjasama mereka berpendapat sama, bahwa sejauh ini tidak ada kendala. Dan apabila suatu saat terjadi kendala, maka kepala desa dan perangkat desa harus saling berkoordinasi untuk mencari solusi dari kendala tersebut dengan melakukan rapat perangkat desa. Dari rapat perangkat desa tersebut, apabila perangkat desa tidak menghadiri rapat maka akan diberi surat peringatan. Apabila perangkat desa juga tidak menghadiri rapat tersebut sampai surat peringatan yang sudah ketiga kalinya diberikan, maka kepala desa berhak melakukan pemecatan kepada perangkat desa tersebut.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Adanya Tujuan yang Ingin Dicapai dalam Program BPNT**

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI No 63 Tahun 2017, tentang penyaluran bantuan

sosial secara non tunai. Program BPNT diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan, meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan berkelanjutan.

Menurut Danim (2004) Adanya kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, ukuran efektivitas antara lain :a) jumlah hasil yang di keluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran; b) tingkat kepuasan yang diperoleh baik kualitas maupun kuantitas; c) produk kreatif, artinya hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja sehingga dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan; d) intensitas yang dicapai.

Berdasarkan teori tersebut, program BPNT tersebut sudah sepenuhnya terkendali dan sudah mencapai tujuan dari program BPNT, sebab masyarakat penerima BPNT sudah menerima bantuan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Dalam mencapai tujuan tersebut tentunya ada kendala yang dihadapi dan perlunya tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini juga dibuktikan dari penelitian bahwa kendala tersebut terletak di masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut, dan mereka juga membutuhkan bantuan tersebut. Tetapi kendala tersebut dapat diatasi oleh pemerintah desa sebab data-data masyarakat yang belum menerima program bpnt akan diproses ulang agar program tersebut tepat sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018 yaitu salah satu tujuan program BPNT untuk memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-warong

tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan) dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari program BPNT sudah tercapai karena program BPNT sudah tepat sasaran dan memberikan kendali kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

#### **4.2.2. Adanya Pelaksanaan Tugas Sesuai Tupoksi**

Sesuai dengan Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018 bahwa pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh tim pendamping BPNT kecamatan berkoordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa setempat, membantu administrasi kelengkapan data dari KPM ke dinas sosial, melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang program BPNT kepada masyarakat penerima BPNT, mendampingi dan mengawasi penyaluran program BPNT yang sedang dilaksanakan, melakukan pemantauan pelaksanaan penyaluran program BPNT, serta melakukan evaluasi data apabila data masyarakat penerima BPNT tidak valid.

Menurut Cantika Kusuma (2022) dalam koordinasi tersebut terdapat hubungan hierarkis yang terjalin atau biasa disebut dengan garis satu komando. Koordinasi ini dilakukan untuk penyamaan persepsi pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Tinokkah agar terlaksana dengan baik. Selain terdapat intruksi ataupun arahan yang bersifat komando, terdapat juga koordinasi yang dilakukan antar bagian pelaksana tersebut dalam menjalankan tugasnya di lapangan agar dalam pelaksanaan penyaluran program BPNT selaras dan seimbang sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Hubungan koordinasi antara kepala desa dengan perangkat desa di Desa Tinokkah dilakukan secara vertikal. Koordinasi ini dilakukan dengan pengarahan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Kepala

Desa Tinokkah terhadap unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya untuk pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Tinokkah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kepala desa dan perangkat-perangkat desa sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam melaksanakan penyaluran program BPNT. Dimana hal tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Tinokkah. Selain itu juga turut memberikan kemudahan kepada pihak penerima bantuan dengan adanya pendampingan dari pelaksanaan penyaluran program BPNT. Selain itu, didapati bahwa pelaksana penyaluran program BPNT di Desa Tinokkah telah melaksanakan kinerjanya dengan baik yang mana dalam melaksanakan program BPNT dapat menangani suatu kendala dengan cepat dan efektif.

#### **4.2.3. Adanya Pengarahan Langsung dari Atasan ke Bawahan**

Agar pelaksanaan program BPNT berjalan dengan baik dan tercapai tujuannya, tentu harus mengikuti pedoman maupun aturan legal yang mengikat teknis pelaksanaan program BPNT. Maka Kementerian/Lembaga lintas Sektor menyusun Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai dan peraturan pemerintah maupun peraturan bupati sebagai tuntunan, arahan, atau acuan teknis pelaksanaan di lapangan. Selain adanya aturan legalistik yang mengatur pelaksanaan penyaluran program BPNT, juga ada pedoman tidak tertulis yang dipedomani dalam pelaksanaan penyaluran program BPNT baik berupa pengarahan maupun penyampaian langsung dari kepala desa ke perangkat desa yang mengatur pelaksanaan program BPNT di lapangan. Arah suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program di lapangan juga ditentukan kejelasan arahan dari pemimpin tersebut.

Menurut Deswimar (2009) salah satu koordinasi vertikal adalah adanya pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit. Tugas atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawah tanggungjawabnya secara langsung.

Pelaksanaan program BPNT yang ada di Desa Tinokkah mengikuti pedoman maupun aturan legal yang mengikat teknis pelaksanaan program BPNT. Pedoman yang digunakan sebagai sumber utama merupakan Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 15 tahun 2021 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Selain itu, kepala desa juga memberikan pengarahan kepada perangkat desa terkait penyaluran program BPNT dengan mengadakan musyawarah desa yang dilakukan seminggu 1 kali agar seluruh perangkat desa mengawasi penyaluran program BPNT, sehingga program tersebut tepat sasaran dan berjalan dengan lancar. Kepala desa juga melakukan pengarahan melalui whatsapp grub agar pengarahan tersebut lebih efektif.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengarahan yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa dalam penyaluran program BPNT sudah berjalan dengan baik, kepala desa aktif memberikan arahan pelaksanaan penyaluran program BPNT. Walaupun masih memiliki kendala dimasyarakat yang belum mendapatkan bantuan program tersebut, tetapi bagi masyarakat yang sudah menerima bantuan tersebut juga mendapati dan merasakan manfaat atas diberikannya arahan maupun pendampingan dalam setiap mengikuti alur pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Tinokkah. Sehingga hal tersebut membantu memudahkan masyarakat penerima BPNT dalam mengikuti setiap prosedur pelaksanaan program BPNT di Desa Tinokkah.

#### **4.2.4. Adanya Kerjasama**

Menurut Deswimar (2009) koordinasi vertikal (*vertical coordination*) yaitu adanya kesatuan-kesatuan kerja atau adanya

kerjasama yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya, koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan oleh pemimpin atau kepala desa karena kepala desa bisa memberi sanksi terhadap aparat desa. Untuk mencapai tujuan bersama di perlukan kerja sama yang baik.

Berdasarkan teori tersebut, bentuk kerjasama yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa yaitu kerukunan, saling menghargai sesama perangkat desa. Dengan cara lebih memahami keadaan maupun situasi dan kondisi lingkungan kerja. Serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan begitu akan membuat kerja sama yang baik.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan kepala desa ke perangkat desa sudah berjalan dengan baik karena dalam melakukan kerjasama antara perangkat desa terjadinya komunikasi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepala desa dan perangkat desa bahwa tidak adanya kendala yang terjadi dalam komunikasi antara perangkat desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi vertikal kepala desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tujuan dari program bpnt di Desa Tinokkah sudah tepat sasaran dalam memberikan kendali kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, kepala desa dan perangkat desa sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam melaksanakan penyaluran program bpnt, kepala desa selalu memberikan pengarahan kepada perangkat desa untuk membahas penyaluran program bpnt, dan kerjasama antara kepala desa dan perangkat desa sudah berjalan dengan baik dan tidak memiliki kendala.

#### **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran agar pemerintah harus lebih aktif lagi memberikan pengarahan-pengarahan supaya koordinasi kepala desa dengan perangkat desa lebih baik lagi sehingga kerjasama tersebut lebih erat dan tidak ada kendala-kendala yang terjadi di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, Dedi. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Ilmu Administrasi Publik*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli
- Andilie, Under. (2013). *Etika penyusunan program kerja dalam struktur pemerintah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Anggara, Sahya dan Sumantri, Li. (2016). *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Cantika, Kusuma. (2022). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Privinsi Jawa Timur*. *Jurnal Nucl. Phys*.
- Danim, Sudirman. (2014). *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektifitas Kelompok*. Bengkulu: PT.Rineka Cipta
- Deswimar, Devi. (2018). *Pengaruh Koordinasi Vertikal Dan Horizontal Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Uin Suska Riau*. *Jurnal El-Riyasah*
- Handyaningrat, s. (2016). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen personalia dan sumberdaya manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasanah, Z., As'ad, M. U., & Akhmad, B. (2021). *Program Kerja Sebagai Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang*. *Jurnal Mahasiswa*.
- Hasibuan, Malayu S. P. (2017). *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hetzer, E. (1983). *Program Kordinator Kerja*. Yogyakarta.
- Sentika, S. dan. (2018). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
- Siagian, P. S. (2013). *Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugandha, D. (2011). *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Syafiie, Inu Kencana. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Waryadi, H., & Hanriana, N. (2022). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warong Di Desa Sukamaju Kecamatan*

Cikakak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Dialektika Politik*, 6(2), 175–201.

**DOKUMEN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial

## LAMPIRAN

### Dokumentasi di Desa Tinokkah



Sumber : Foto Bersama Bapak Rio Pances Damanik, S.H, Selaku Kepala Desa Tinokkah



Sumber : Foto Bersama Bapak Yusrizal, Selaku Kepala Dusun VI Desa Tinokkah



Sumber : Foto Bersama Bapak Oka Darma, S.Pd, Selaku Pendamping BPNT Desa Tinokkah



Sumber : Foto Bersama Ibu Mardiana Sitepu, Selaku Masyarakat Penerima BPNT Desa Tinokkah



Sumber : Foto Bersama Bapak Aben Saragih, Selaku Masyarakat Penerima BPNT Desa Tinokkah



Sumber : Foto Bersama Bapak Sujani, Selaku Masyarakat Penerima BPNT Desa Tinokkah



Sumber : Foto Kegiatan Pelaksanaan Penyaluran Program BPNT



## PEDOMAN WAWANCARA

### FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA TINOKKAH

#### Pedoman Wawancara Penelitian ke Kepala Desa dan Aparat Desa Tinokkah

Nama : Rio Pances, S.H

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 47 tahun

Alamat : Tinokkah

Pekerjaan : Kepala Desa

#### A. Adanya Hubungan Efektif

1. Apakah program BPNT sudah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan?

Sudah terkendali. Karena adanya bpnt tersebut  
dapat membantu masyarakat yang kurang  
mampu.

2. Bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut?

Pemerintah desa harus mengawasi penyaluran  
program bpnt tersebut agar tahu apakah  
program bpnt tersebut tepat sasaran atau  
tidak

.....  
3. Apa kendala dalam mencapai tujuan tersebut?

Tidak ada

**B. Adanya Hubungan Hierarkis**

1. Apakah sudah terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa?

Sudah terbentuk

2. Apakah struktur tersebut berjalan sesuai dengan tugasnya?

Sudah berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing

3. Apakah ada tupoksi terkait dengan tugas-tugas struktur organisasi tersebut?

ada

### C. Adanya Pengarahan

1. Bagaimana bentuk pengarahan yang dilakukan kepala desa dalam mengkoordinasikan perangkat desa dengan tujuan membahas penyaluran BPNT?

Mengadakan musyawarah desa, agar seluruh perangkat desa mengawasi kegiatan penyaluran tersebut agar tepat sasaran.

2. Dalam melakukan pengarahan apakah kepala desa pernah memberikan langkah-langkah strategi kepada aparat desa?

Ada, tentu kepala desa harus memberikan pengarahan ke aparat desa tentang tugas-tugas perangkat desa yang dilakukan seminggu 1 kali.

3. Apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan pengarahan?

Pengarahan ke aparat desa tidak ada. Tetapi kendala di masyarakat yaitu sulitnya mengumpulkan masyarakat dikarenakan memiliki kesibukan.

Masing-masing sehingga pengarahannya tersebut...  
sering tertunda.

#### D. Adanya Kerjasama

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa?

Berkoordinasi dengan perangkat desa sehingga...  
kerjasama tersebut berjalan dengan baik...  
dan sesuai dengan prosedur yg ada.

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa?

Tidak ada kendala

3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam meningkatkan kerjasama kepala desa dengan perangkat desa?

Dengan melaksanakan rapat antar perangkat...  
desa untuk mencari solusi dari kendala...  
tersebut. Dan Kepala Desa berhak melakukan...  
pemecatan kepada perangkat desa apabila perangkat...  
desa tidak menghadiri rapat selama 3 kali berturut-turut

## PEDOMAN WAWANCARA

### FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA TINOKKAH

Pedoman Wawancara Penelitian ke Kepala Desa dan Aparat Desa Tinokkah

Nama : Jusrizal  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Umur : 30 tahun  
Alamat : Dusun VI Nagori 15  
Pekerjaan : Kepala Dusun VI

#### A. Adanya Hubungan Efektif

1. Apakah program BPNT sudah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan?

Tentu sudah

2. Bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut?

Pangan langsung mengawasi penyaluran

program bpnt di desa Tinokkah agar tahu

program bpnt di desa Tinokkah tepat sasaran atau tidak.

3. Apa kendala dalam mencapai tujuan tersebut?

Tidak ada sebab selalu berkoordinasi dengan Kepala desa

#### B. Adanya Hubungan Hierarkis

1. Apakah sudah terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa?

Sudah terbentuk

2. Apakah struktur tersebut berjalan sesuai dengan tugasnya?

Sesuai dengan tugas dan sudah terlaksana

3. Apakah ada tupoksi terkait dengan tugas-tugas struktur organisasi tersebut?

ada

### C. Adanya Pengarahan

1. Bagaimana bentuk pengarahan yang dilakukan kepala desa dalam mengkoordinasikan perangkat desa dengan tujuan membahas penyaluran BPNT?

Membantu masyarakat penerima program bpnt dan menertibkan agar penyaluran bpnt berjalan dengan lancar.

2. Dalam melakukan pengarahan apakah kepala desa pernah memberikan langkah-langkah strategi kepada aparat desa?

Tentu, dalam proses penyaluran bpnt kepala desa pernah memberikan pengarahan.

3. Apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan pengarahan?

Ada di masyarakat - masyarakat yang tidak mau mengalah karena juga ingin mendapatkan program bpnt.

#### D. Adanya Kerjasama

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa?

Dengan berkoordinasi

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa?

Tidak ada kendala

3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam meningkatkan kerjasama kepala desa dengan perangkat desa?

Komunikasi antar sesama perangkat desa dan kepala desa.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM  
PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA  
TINOKKAH**

**Pedoman Wawancara Penelitian ke Kepala Desa dan Aparat Desa Tinokkah**

Nama : Oka Parma, S., Pd

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 35 tahun

Alamat : Dusun Ul nagori II

Pekerjaan : Pendamping sosial

**A. Adanya Hubungan Efektif**

1. Apakah program BPNT sudah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan?

Sudah, karena sesuai dengan yang dibutuhkan KPM dan tersalur dengan baik

2. Bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut?

Tentunya harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada di desa maupun di pemerintahan.

3. Apa kendala dalam mencapai tujuan tersebut?

Kendalanya terletak di masyarakat yang  
belum menerima program BPT tersebut.  
Padahal mereka juga membutuhkan bantuan  
tersebut.

### B. Adanya Hubungan Hierarkis

1. Apakah sudah terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa?

Sudah terbentuk.

2. Apakah struktur tersebut berjalan sesuai dengan tugasnya?

Berjalan dengan baik dan sesuai dengan  
tugas masing-masing.

3. Apakah ada tupoksi terkait dengan tugas-tugas struktur organisasi tersebut?

Tentunya ada.

### C. Adanya Pengarahan

1. Bagaimana bentuk pengarahan yang dilakukan kepala desa dalam mengkoordinasikan perangkat desa dengan tujuan membahas penyaluran BPNT?

Dilaksanakan suatu musyawarah desa

2. Dalam melakukan pengarahan apakah kepala desa pernah memberikan langkah-langkah strategi kepada aparat desa?

Pastinya ada karena kades selalu memberikan

pengarahan ke bawahannya

3. Apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan pengarahan?

Kurangnya masyarakat yang memahami apa

yang disampaikan kades / aparat desa

mengenai bpnt.

#### D. Adanya Kerjasama

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa?

Tentunya dengan berkoordinasi dengan kepala desa

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa?

Tidak ada karena seharusnya sudah saling mengerti apa tujuan dari bnt.

3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam meningkatkan kerjasama kepala desa dengan perangkat desa?

Berdiskusi antara perangkat desa dan kepala desa serta pihak-pihak desa.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM  
PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA  
TINOKKAH**

**Pedoman Wawancara Penelitian ke Masyarakat Penerima Bantuan Pangan  
Non Tunai di Desa Tinokkah**

Nama : Aben Saragih

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 67 tahun

Alamat : Dusun VI Nagari II

Pekerjaan : Masyarakat

**A. Adanya Hubungan Efektif**

1. Menurut anda apakah program BPNT di desa sudah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan?  
Sudah berjalan dengan baik

.....  
.....  
.....  
.....

2. Apakah langkah-langkah tersebut berjalan dengan baik?  
Berjalan dengan baik

.....

3. Menurut anda apa kendala tersebut?

Setau saya tidak ada kendala

#### B. Adanya Hubungan Hierarkis

1. Menurut anda bagaimana dengan struktur organisasi dan tata kerja di pemerintahan desa?

Tersusun dengan baik

2. Apakah struktur tersebut berjalan sesuai dengan tugasnya?

Berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing

### C. Adanya Pengarahan

1. Menurut anda apakah pengarahan yang dilakukan kepala desa dengan aparat desa terkait penyaluran BPNT berjalan dengan baik?

Berjalan dengan baik

2. Menurut anda apakah kepala desa ada memberikan langkah-langkah strategi ke aparat desa?

kurang paham

3. Menurut anda apa kendala yang dihadapi kepala desa dan aparat desa dalam memberikan pengarahan?

Kendalanya saat mengumpulkan masyarakat sehingga pengarahan yang ingin disampaikan sedikit sulit

**D. Adanya Kerjasama**

1. Menurut anda apakah kerjasama yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa berjalan dengan baik?

Baik  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Menurut anda apa kendala yang dihadapi kepala desa dalam melakukan kerjasama dengan perangkat desa?

Saya tidak tau  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Menurut anda bagaimana cara kepala desa dan perangkat desa dalam mengatasi kendala yang terjadi?

Kerjasama antara kepala desa dengan masyarakat  
agar sesuai dengan apa yang diinginkan kades  
.....  
.....  
.....

**PEDOMAN WAWANCARA**

**FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM  
PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA  
TINOKKAH**

**Pedoman Wawancara Penelitian ke Masyarakat Penerima Bantuan Pangan  
Non Tunai di Desa Tinokkah**

Nama : *Mardiana Sitepu*  
Jenis Kelamin : *Perempuan*  
Umur : *52 tahun*  
Alamat : *Dusun VI Nagori II*  
Pekerjaan : *Masyarakat*

**A. Adanya Hubungan Efektif**

1. Menurut anda apakah program BPNT di desa sudah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan?  
*Sudah*  
.....  
.....  
.....  
.....
2. Apakah langkah-langkah tersebut berjalan dengan baik?  
*Selama ini berjalan dengan baik*  
.....

3. Menurut anda apa kendala tersebut?

Tidak tau

### B. Adanya Hubungan Hierarkis

1. Menurut anda bagaimana dengan struktur organisasi dan tata kerja di pemerintahan desa?

Baik

2. Apakah struktur tersebut berjalan sesuai dengan tugasnya?

Tidak tau sepenuhnya

### C. Adanya Pengarahan

1. Menurut anda apakah pengarahan yang dilakukan kepala desa dengan aparat desa terkait penyaluran BPNT berjalan dengan baik?

Baik

2. Menurut anda apakah kepala desa ada memberikan langkah-langkah strategi ke aparat desa?

Tidak tau

3. Menurut anda apa kendala yang dihadapi kepala desa dan aparat desa dalam memberikan pengarahan?

Tidak tau

#### D. Adanya Kerjasama

1. Menurut anda apakah kerjasama yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa berjalan dengan baik?

Tidak tau

2. Menurut anda apa kendala yang dihadapi kepala desa dalam melakukan kerjasama dengan perangkat desa?

Tidak tau

3. Menurut anda bagaimana cara kepala desa dan perangkat desa dalam mengatasi kendala yang terjadi?

Tidak tau

## PEDOMAN WAWANCARA

### FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA TINOKKAH

#### Pedoman Wawancara Penelitian ke Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tinokkah

Nama : Sujani  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Umur : 66 Tahun  
Alamat : Dusun VI Nagori II  
Pekerjaan : Masyarakat

#### A. Adanya Hubungan Efektif

1. Menurut anda apakah program BPNT di desa sudah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan?  
Sudah berjalan dengan baik dan kebutuhan pangan sudah mulai terlihat dan tersalur sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat penerima BPNT.
2. Apakah langkah-langkah tersebut berjalan dengan baik?  
Langkah-langkah tersebut sudah berjalan

3. Menurut anda apa kendala tersebut?

Tidak ada kendala, setiap program yang  
sudah dibuat terlaksana dengan baik sebab  
Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan perangkat  
desa.

## B. Adanya Hubungan Hierarkis

1. Menurut anda bagaimana dengan struktur organisasi dan tata kerja di pemerintahan desa?

Struktur pemerintahan sudah bagus.

2. Apakah struktur tersebut berjalan sesuai dengan tugasnya?

Seperti yang terlihat sudah berjalan dengan  
baik dan sesuai dengan tugasnya masing-  
masing.

### C. Adanya Pengarahan

1. Menurut anda apakah pengarahan yang dilakukan kepala desa dengan aparat desa terkait penyaluran BPNT berjalan dengan baik?

Baik.

2. Menurut anda apakah kepala desa ada memberikan langkah-langkah strategi ke aparat desa?

Saya pikir ada umam saya tidak begitu tahu strategi tersebut.

3. Menurut anda apa kendala yang dihadapi kepala desa dan aparat desa dalam memberikan pengarahan?

Kendalanya terletak di aspirasi - aspirasi masyarakat yang pro dan kontra sehingga terjadinya keributan antar masyarakat.

#### D. Adanya Kerjasama

1. Menurut anda apakah kerjasama yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa berjalan dengan baik?

Baik.  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Menurut anda apa kendala yang dihadapi kepala desa dalam melakukan kerjasama dengan perangkat desa?

Saya tidak tahu.  
.....  
.....  
.....

3. Menurut anda bagaimana cara kepala desa dan perangkat desa dalam mengatasi kendala yang terjadi?

Tentunya harus berkoordinasi untuk mencari  
solusi apa yang menjadi kendala antara  
kepala desa dan aparat desa agar program  
tersebut lebih efektif  
.....



**UMSU**

Aggul | Cerdas | Terpercaya  
menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu**  
**Ketua Program Studi Ananda Mahardika**  
**FISIP UMSU**  
di  
**Medan.**

Medan, ..06.. Februari ..2023..

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dwi Ananda Melani  
N P M : 1903100029  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3.56

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Tungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa dalam Pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinoktah Kabupaten Serdang Bedagai	6/2 Feb 2023 ✓
2	Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Sipispis	
3	Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah MAS. AL WASHLIYAH 26 Tinoktah	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :  
Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 06 - Februari ..2023..

Ketua,  
  
( ..... )  
NIDN: .....

DB: DEDI AMRIKAL  
(017)

Pemohon  
  
( Dwi Ananda Melani )  
Dosen Pembimbing yang ditunjuk Program Studi .....  
  
( ..... )  
NIDN: .....



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jika menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 227/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **06 Februari 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DWI ANANDA MELANI**  
N P M : 1903100029  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA TINOKKAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 017.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Februari 2024.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 22 Rajab 1444 H  
13 Februari 2023 M

Dekan

**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Medan, 22 Mei 2023

Hal : Permohonan perubahan judul skripsi

Kepada Yth :  
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara  
di-  
Medan

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DWI ANANDA MELANI  
Npm : 1903100029  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Administrasi Pembangunan

Bermohon kepada bapak Ketua program studi ilmu komunikasi untuk pergantian judul skripsi saya:

Judul awal :

**Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinokkah Kabupaten Serdang Badagai**

Berganti menjadi:

**Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinokkah**

Demikian permohonan ini dibuat, atas pertimbangan bapak saya ucapkan terimakasih  
Wassalamualaikum/ Wr. Wb

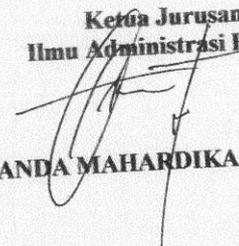
Dosen Pembimbing

  
(DEDI AMIRIZAL, S.Sos., M.Si)

Hormat pemohon :

  
(DWI ANANDA MELANI)

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik

  
(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

**Nomor : 227/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **06 Februari 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DWI ANANDA MELANI**  
N P M : 1903100029  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA TINOKKAH**  
Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

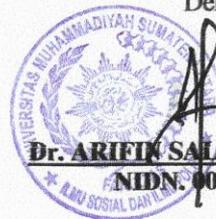
Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 017.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Februari 2024.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 23 Rajab 1444 H  
14 Februari 2023 M

Dekan,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN: 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





**UMSU**

Inggul | Cerdas | Terpercaya  
Harap surat ini agar disebutkan  
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Medan, Senin 6 - Maret 2023

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DWI ANANDA MELANI  
N P M : 1903100029  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 227 /SK/II.3/UMSU-03/F/2023. tanggal 13 Februari 2023 dengan judul sebagai berikut :

FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM  
PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
(BPNT) DI DESA TINOKKAH KABUPATEN JERDANG BEDAGAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih, *Wassalam.*

Menyetujui :  
Pembimbing

(DEDI AMBARA, S.Sos., M.Si)

Pemohon,

DWI ANANDA MELANI

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 477/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	FEBRI YOLANDA	1903100013	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	FUNGSI MANAJEMEN ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN TUJAS PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BANDAR MASILAM 2
7	ERMA VANIA	1903100016	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	PERAN PENGAWASAN LANGSUNG LURAH DALAM MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN TUJAS KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN KARTINI
8	DWI ANANDA MELANI	1903100029	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA TINOKKAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
9	SRI REZEKINA	1903100042	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	STRATEGI DIRECTING KEPALA DESA DALAM TRANSPARANSI PENDATAAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SEI ROTAN
10	CINDY PARADIAN	1803100008	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN PELAYANAN PENGADUAN ASPIRASI ONLINE RAKYAT (E-LAPOR) DI KOTA TANJUNG BALAI

Medan, 22 Syaaban 1444 H

15 Maret 2023 M

Dekan,

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 987/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 24 Dzulqaidah 1444 H  
13 Juni 2023 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Tinokkah**  
**Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai**

di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **DWI ANANDA MELANI**  
N P M : 1903100029  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA TINOKKAH**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN/0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
KECAMATAN SIPISPIS  
**DESA TINOKKAH**

Alamat Kantor : Jl. Nagori I Desa Tinokkah

Kode Pos : 20992

SURAT IZIN PENELITIAN  
Nomor: 18.45.7/474/266/VI/2023

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RIO PANCES DAMANIK, SH  
Jabatan : Kepala Desa Tinokkah  
A l a m a t : Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis  
Kabupaten Serdang Bedagai

2. Memberikan Izin Kepada :

Nama : DWI ANANDA MELANI  
NIM : 1903100029  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa  
Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan  
Non Tunai ( BPNT ) Di Desa Tinokkah

3. Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dan telah menyerahkan Laporan Penelitiannya pada Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Demikianlah surat perizinan ini kami perbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan : Desa Tinokkah  
Pada Tanggal : 28 Juni 2023

KEPALA DESA TINOKKAH



RIO PANCES DAMANIK, SH



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**KECAMATAN SIPSISPIS**  
**DESA TINOKKAH**

Alamat Kantor : Jl. Nagori I Desa Tinokkah

Kode Pos : 20992

**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET**  
Nomor : 18.45.7/474/295/VII/2023

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIO PANCES DAMANIK, SH  
Jabatan : Kepala Desa Tinokkah  
Alamat : Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis  
Kabupaten Serdang Bedagai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DWI ANANDA MELANI  
NIM : 1903100029  
Judul : Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa Dalam  
Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai  
( BPNT ) Di Desa Tinokkah

2. Benar nama tersebut telah melakukan kegiatan penelitian di Desa Tinokkah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dan telah menyerahkan Laporan Penelitiannya pada Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Desa Tinokkah  
Pada Tanggal : 21 Juli 2023

**KEPALA DESA TINOKKAH**



**RIO PANCES DAMANIK, SH**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggu: Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : Dwi Ananda Melani  
N P M : 1903100029  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Timokkah

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	23/05 2023	Bimbingan Bab 1 - Bab 3	
2.	23/05 2023	Revisi Latar Belakang	
3.	28/05 2023	Revisi Uraian Teoritis	
4.	04/06 2023	Revisi Metode Penelitian, Peta Konsep.	
5.	05/06 2023	Revisi Kategorisasi	
6.	07/06 2023	Bimbingan Draft Wawancara	
7.	12/06 2023	Acc Draft Wawancara	
8.	17/07 2023	Revisi Bab 4: Pembahasan	
9.	25/07 2023	Bimbingan Abstrak	
10.	26/07 2023	Acc Skripsi	

Medan, Rabu 09 Agustus 2023...

Dekan,  
(Dr. Anifia Saleh, S.Sos., M.Si)  
NIDN: 0020017402

Ketua Program Studi,  
(Ananda Mahardika, S.Sos., M.Si)  
NIDN: 022118801

Pembimbing,  
(Dedi Amizal, S.Sos., M.Si)  
NIDN: 616097201





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila membuat surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) [perpustakaan\\_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 833 / KET/IL.3-AU /UMSU-P/M/2023

*Surat Keterangan*

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Dwi Ananda Melani  
NIM : 1903100029  
Univ./Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan/P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 02 Dzulqaidah 1444 H  
22 Mei 2023 M



Kepala Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

**JAPK**  
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan

**JAPK**

(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

ISSN 2807-6729



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION**

Dear Ms. Dwi Ananda Medani

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "**Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinokkah**" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 3 No 2 December (2023). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, August 9, 2023

Editor In Chief

(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)  
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umhsu.ac.id/index.php/JAPK/index>  
Contact: 082160559891

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 1552/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUI				Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III		
6	TIARA SCFIYANTI	1903100080	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	STRATEGI DIRECTING KEPALA DINAS DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	
7	DWI ANANDA MELANI	1903100029	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	AFFAN AL-GUDDUS, S.Sos., M.Si.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA TINOKKAH	
8	IMAM SOLEH SIREGAR	1903100045	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAMAS UTARA	
9	NURHALIMAH LUBIS	1903100012	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PENGELOMPOKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG	
10	YULFANI INDRIAWATI	1903100071	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	STRATEGI ORGANIZING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PATEN (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN) DI KECAMATAN MEDAN AMPILAS	

Notulis Sidang:

Ditetapkan oleh :

  
Rektor  
Dr. M. H. ARIFIN, SH, M.Hum

Dr. ARIFFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.kom

Medan, 04 Safar 1445 H  
21 Agustus 2023 M